



**KHAUL TITIS AGUNG:** Kirab budaya Khaul Titis Agung BPH Panular dan GBPH Moerdhaningrat digelar warga Padukuhan Nglengkong Kalurahan Sumberrejo Kapanewon Tempel, Rabu (7/4) sore. Agenda rutin jelang Ramadan yang dihadiri Bupati Sleman Kustini ini diramaikan dengan pergelaran sosio drama yang diperankan warga yang terhimpun dalam Forum Budaya Sumberrejo (FBS) mengangkat sejarah dari BPH Panular dan GBPH Moerdhaningrat.

KR-Istimewa

## TERKAIT BOCORNYA SOAL UJIAN ASPD

# Dinas Segera Bentuk Tim Pencari Fakta

**SLEMAN (KR)** - Pelaksanaan Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) bukan ujian nasional dan bukan pengganti UAN, yang diselenggarakan di tingkat DIY. ASPD ini bertujuan mengetahui standar penguasaan kompetensi siswa yang selama ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh (daring).

"ASPD juga digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. ASPD direncanakan sebagai salah satu sarana perhitungan (tentunya dari perhitungan nilai lainnya), untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. ASPD tidak menentukan kelulusan siswa,

karena kelulusan siswa ditentukan dengan ujian sekolah yang diselenggarakan sekolah masing-masing sesuai Peraturan Kemendikbud Nomor: 1 Tahun 2021," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana kepada wartawan di Pendapa Parasamsya Setda Sleman, Kamis (8/4).

Dijelaskan Ery, untuk mendapatkan hasil dalam mengukur kemampuan siswa maka dalam kegiatan ASPD dihadirkan siswa kelas IX bagi SMP.

Ditambahkan, ASPD diselenggarakan di tingkat Dinas Pora DIY termasuk dalam penyelenggaraan diatur dan dilaksanakan oleh Provinsi. Mulai dari pembuatan soal sampai dengan pendistribusian, Dinas Pendidikan Kabupaten tinggal melaksanakan dan soal diberikan secara online saat jam pelaksanaan ASPD. Sehingga Dinas Pendidikan sendiri tidak mengetahui soalnya

seperti apa dan hasil juga tidak tahu.

"Yang perlu diklarifikasi adanya kebocoran soal telah dikordinasikan dengan Dinas Pora DIY dan belum dapat memastikan bocor apa tidak karena sistemnya online. Kesepakatan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki benar tidaknya terjadinya kebocoran soal. Untuk memberikan rasa kenyamanan, ketenangan dan keadilan maka mengajukan usulan untuk pelaksanaan ASPD ulang di sekolah yang disinyalir ada kebocoran," jelas Ery. (Has)-f

## HASILKAN 8,8 TON PERHEKTARE

# Inovasi Irigasi Tetes Cabai Dongkrak Produksi

**NGAGLIK (KR)** - Bupati Sleman Kustini meresmikan demonstrasi plot (demplot) Irigasi Tetes Komoditas Cabai di Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi Sleman. Inovasi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) tersebut diresmikan di lahan pertanian Dusun Ngepas Ngaglik ditandai dengan penanaman cabai oleh Bupati Kustini, Wabup Danang Maharsa didampingi Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Miyono, Kamis (8/4).

Bupati berharap keberadaan demplot tersebut memberikan contoh bagi petani untuk menerapkan teknologi yang tepat guna. Selain itu, dengan adanya inovasi teknologi ini mampu



KR-Istimewa

**Bupati Kustini, Wabup Danang dan Miyono menanam cabai dengan inovasi irigasi tetes.**

mendorong generasi milenial untuk terjun di dunia pertanian menjadi petani milenial.

Sementara Miyono mengatakan, BI terus mendukung ketahanan pangan

melalui komoditas cabai di DIY. Bekerjasama dengan Pemkab Sleman menerapkan inovasi Irigasi Tetes Cabai seluas 20 hektare di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2021. "Dengan

menjaga stok cabai di pasaran, tentu akan mewujudkan stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi dari sisi suplai sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi," ujarnya.

Sedangkan Ketua Perkumpulan Petani Hortikultura Puncak Merapi Sleman Inoki Azmi Purnomo mengakui, dengan diterapkannya metode tersebut di komunitasnya berhasil meningkatkan produksi cabai. Selain itu, dengan metode tersebut dapat mengoptimalkan biaya produksi karena penggunaan air yang minim. "Produksi kita pun meningkat dari awalnya 7,6 ton perhektare menjadi 8,8 ton perhektare," ungkapnya. (Has)-f

## CEGAH INTOLERANSI DAN RADIKALISME Moderasi Beragama Perlu Digencarkan



KR-Saifulloh Nur Irfan

**Suasana dialog antarumat beragama.**

**SLEMAN (KR)** - Aksi intoleransi dan radikalisme harus dicegah sejak dini agar tidak menyebarluas di masyarakat. Salah satu langkah yang perlu dilakukan melalui moderasi beragama digencarkan di masyarakat. Sehingga ruang gerak aksi intoleransi dan radikalisme semakin sempit.

Kepala Kantor Kementerian Agama Sleman H Sa'ban Nuroni menjelaskan, radikalisme dan ekstrimis-

me itu sebagai pemahaman. Namun jika itu sudah ada pergerakan akhirnya terjadi aksi terorisme.

"Ketika ada penangkapan terhadap pelaku teroris, itu hanya sebentar saja mereka menghilang. Tapi nanti akan tumbuh kembali," katanya saat dialog antarumat beragama 'Memahami Gerakan dan Bersatu Melawan Aksi Intoleransi dan Radikalisme' di Sleman, Kamis (8/4).

Menurut Sa'ban, untuk

mencegah radikalisme dan terorisme sebenarnya bisa dilakukan dengan moderasi agama. Di mana moderasi agama merupakan cara beragama yang moderat yakni adil dan menentramkan tanpa menimbulkan keresahan. "Jika masyarakat pola pikir dan bertindak secara moderat, paham radikalisme dan terorisme akan tersingkir. Sehingga moderasi agama ini perlu digencarkan di masyarakat," ujarnya.

Sa'ban mengimbau masyarakat untuk mempunyai respons atau sensor sosial yang tinggi. Jika ada orang asing atau jarang sosialisasi harus diajak mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan bersama masyarakat. "Justru orang-orang seperti itu harus diajak untuk bersosialisasi. Supaya kita tahu siapa sebenarnya orang tersebut maupun aktivitasnya. Itu juga bagian dari mencegah aksi intoleransi dan radikalisme," pintanya. (Sni)-f

## Sleman Prioritaskan Vaksin Lansia

**SLEMAN (KR)** - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman menargetkan ada 100.000 lebih petugas pelayanan publik akan mendapatkan vaksin Covid-19 pada tahap dua. Sampai saat ini, dari target tersebut baru tercapai 40 persen. Bagi petugas pelayanan publik yang mengajukan untuk mendapatkan dosis vaksin pertama, Dinkes Sleman tidak dapat langsung memberikan, melainkan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY.

"Mengapa demikian, begitu kami memberikan dosis pertama. Kami harus mengamankan untuk pemberian dosis yang kedua. Padahal sesuai kebijakan DIY, untuk vaksinasi pada pelayanan publik dikurangi terlebih dahulu. Karena saat ini prioritasnya lansia," ujar Kadinkes Sleman Joko Hastaryo ketika memantau vaksinasi kedua di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Kamis (8/4).

Joko mencontohkan untuk vaksinasi kedua di Bandara Adisutjipto, yang pertama sudah diberikan sekitar dua pekan lalu. Untuk yang kedua tetap dapat diberikan sesuai jadwal. Saat ini stok vaksin di Dinkes Sleman ada 14.000 dosis. Di saat yang bersamaan, Sleman sedang menyelenggarakan vaksinasi massal. Di Kapanewon Prambanan, lansia di sekitar kampus UII dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

"Untuk sisa vaksin akan kita lanjutkan bagi lansia di sejumlah faskes. Vaksinasi

tahap kedua bagi petugas pelayanan publik dan lansia ditargetkan selesai Juli. Baru setelah itu vaksinasi

bagi masyarakat kelompok rentan dan masyarakat biasa pada Agustus nanti," jelasnya. (Awh)-f



## Digitalisasi Pajak dan Restribusi

**SLEMAN (KR)** - Sleman smart regency seharusnya tidak hanya sebatas pada mempermudah pelayanan publik semata. Namun untuk transparansi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Di antaranya yang perlu dilakukan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari PKS M Agus Mas'udi ST mengatakan, begitu ditetapkan sebagai Sleman smart regency seharusnya semua pelayanan publik sudah secara elektronik. Termasuk pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik atau digital.

"Seharusnya pembayaran pajak dan retribusi sudah tak tunai, tapi secara nontunai. Di antaranya pajak hotel, restoran, PBHTB, retribusi parkir dan lainnya," kata Agus di Sleman, Kamis (8/4).

Ketika digitalisasi pajak dan retribusi ini dilaksanakan, sebenarnya tak hanya mendukung program smart regency saja. Namun juga mendukung program dari pemerintah yaitu cashless atau nontunai.

"Pemerintah sedang menggencarkan pembayaran nontunai. Ketika ini dijalankan, otomatis mendukung dua pro-

**M Agus Mas'udi ST**  
Anggota DPRD Sleman dari PKS



KR-Istimewa

**M Agus Mas'udi ST**

gram sekaligus. Bahkan itu juga bagus dilaksanakan pada masa pandemi ini untuk mengurangi peredaran uang tunai," terangnya.

Menurut Agus, digitalisasi pajak dan retribusi ini sebenarnya juga untuk transparansi karena uang yang masuk akan langsung ke rekening pemerintah daerah. Sehingga nantinya akan meningkatkan PAD di Kabupaten Sleman.

"Digitalisasi pajak dan retribusi untuk mencegah kebocoran dan mengoptimalkan pendapatan. Misalnya pembayaran parkir maupun pajak hotel menggunakan elektronik ini akan lebih jelas berapa yang diterima oleh pengelola maupun pemerintah daerah," ujarnya.

Untuk melaksanakan program ini, perlu ada terobosan dan kebijakan dari kepala daerah, yakni membuat payung hukum, sistem dan sosialisasi kepada masyarakat. Mengingat setiap kebijakan akan menimbulkan pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan. "Ketika perda sudah disusun, tinggal mencari pakar untuk membuat sistemnya dan saya yakin Sleman banyak pakar di bidang itu. Kemudian perlu disosialisasikan dengan baik dengan melibatkan semua pihak agar bisa berjalan dengan baik," pinta Agus. (Sni)-f

## Waspadai Penipuan Modus Janjikan Pekerjaan

**SLEMAN (KR)** - Penipuan dengan modus mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), belum lama ini diungkap Polsek Berbah. Untuk memuluskan aksinya, pelaku yang tak punya pekerjaan itu mengaku sebagai PNS di Kementerian PUPR yang dapat mencari proyek kepada seorang kontraktor.

Pada aksinya dengan korban yang lain, pelaku berinisial MI ini berpura-pura menjadi anggota polisi, dengan tujuan yang sama yakni agar target percaya dengan omongannya. Dari beberapa korban, pelaku mencari

asaran melalui media sosial, kemudian setelah intens komunikasi, diajak bertemu. Bahkan untuk meyakinkan korban, pelaku juga memasang foto dengan seragam seolah sebagai pegawai kementerian.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto SIK mengingatkan, agar masyarakat waspada kasus penipuan dengan berbagai modus. "Salah satu penipuan yang harus diwaspadai, jika ada orang yang baru kita kenal mengaku sebagai PNS. Apalagi jika orang tersebut menjanjikan sesuatu dengan imbal-

an uang, patut kita waspadai," ucap Yuliyanto kepada KR, Kamis (8/4).

Kabid Humas memberikan sejumlah tips agar tidak jadi korban penipuan. Hal yang paling pokok adalah jangan mudah percaya. Apalagi jika orang tersebut baru saja dikenal lewat media sosial, kemudian meminta sejumlah uang. Jika orang tersebut mengaku sebagai aparat atau PNS, tanyakan kartu anggota atau identitas diri, kemudian sandingkan dua identitas tersebut apakah sinkron. Untuk lebih memastikan, kroscek kepada lembaga atau institusi berwenang. (Ayu)-f

Advertisement for DPRD Kabupaten Sleman featuring M Agus Mas'udi ST and information about digitalization of taxes and retributions.

Advertisement for Daihatsu GranMax Pick Up, highlighting features like 'RINGAN bayarnya LANCAR usahanya!!' and 'TOTAL BAYAR PERTAMA MULAI 13 JUTA-AN'.